

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hilyati Nurul Shadrina, Sjarief Hidajat

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

*correspondence: 18013010217@student.upnjatim.ac.id

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan hubungan antara variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pemerintahan Kabupaten Tuban menjadi tempat penelitian ini. Purposive sampling digunakan dalam penelitian ini, dan penyebaran kuisioner kepada responden merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Aplikasi software SPSS 26 digunakan untuk teknik analisis data dalam penelitian ini. Penelitian ini menemukan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh penyajian laporan keuangan, namun aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan yang lengkap dan sesuai dengan SAP memungkinkan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan yang tepat. Aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mungkin karena masih banyak hambatan untuk mendapatkan laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, baik media massa maupun website tidak banyak memberikan informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah dimasing-masing daerah.

Kata kunci: penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Abstract. The purpose of this research is to test and prove the relationship between the variables of financial statement presentation and accessibility to the accountability variables of regional financial management in Tuban Regency. This research uses quantitative methods. The government of Tuban Regency is the place of this research. Purposive sampling was used in this study, and distributing questionnaires to respondents was the data collection method used in this study. The SPSS 26 software application is used for data analysis techniques in this study. This study found that the regional financial management accountability variable was influenced by the presentation of financial reports, but accessibility had no effect on regional financial management accountability. Presentation of financial reports that are complete and in accordance with SAP allows control and supervision of proper financial management. The accessibility of regional financial reports does not affect the accountability of regional financial management. This may be because there are still many obstacles to obtaining local government financial reports. In addition, both the mass media and websites do not provide much information regarding local government financial reports in each region.

Keywords: presentation of financial reports, accessibility and accountability of regional financial management.

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik yaitu sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga publik untuk memberikan pertanggungjawaban mereka kepada publik. Masalah akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara tidak dapat dipisahkan dari prinsip good governance dalam penyelenggaraan negara Tujuan PP No. 71 Tahun 2010 untuk membuat laporan keuangan yang lebih akuntabel dan berkualitas. Informasi akuntansi yang dicantumkan dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh satuan kerja pemerintah daerah harus dapat dipahami oleh pihak yang menggunakan laporan keuangan tersebut dan harus mendukung pengambilan keputusan. Masyarakat menuntut agar pemerintah terbuka dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, perlu diterapkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang seharusnya dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Wiguna, 2015).

Organisasi sektor publik harus dapat menjamin akuntabilitas publik melalui laporan keuangannya karena mengelola dana publik. Laporan keuangan akan mendorong akuntabilitas dan memastikan transparansi jika informasi disajikan secara keseluruhan. Semakin besar implikasi peningkatan realisasi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka semakin baik pula penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan harus mencakup semua informasi yang relevan untuk menjamin akuntabilitas publik.

Pengukuran kinerja merupakan alat ukur yang diperlukan untuk menentukan tingkat pencapaian kegiatan atau program pemerintah. Pengukuran kinerja akan membantu pejabat pemerintah dalam menentukan sejauh mana tujuan telah tercapai, serta membantu masyarakat dalam menentukan apakah tingkat pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sejalan dengan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pelayanan (Purnama dan Nardisyah, 2016). Berdasarkan data dari jatimpos.co laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tuban 2019 permasalahan utama Pendapatan Daerah Kabupaen Tuban antara lain, 1. Tingginya ketergantungan pada dana transfer dan ketidak pastian besaran/alokasi yang akan diterima; 2. Kinerja beberapa unit usaha daerah masih belum optimal, sehingga kontribusi terhadap PAD masih relatif kecil; 3. Terbatasnya jumlah sumber daya pengelola pendapatan, sehubungan dengan luasnya cakupan objek pendapatan; dan 4. Tidak ada kepastian besaran bantuan keuangan yang akan diterima dari pemerintah provinsi, dalam menetapkan target pendapatan APBD.

Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat dan membuktikan pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Tuban. Selain itu, minimnya penelitian yang dilakukan pada pemerintahan Kabupaten Tuban, khususnya terkait penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah membuat peneliti tertarik untuk memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, populasi dalam penelitian ini adalah Bappeda dan BPPKAD pemerintah Kabupaten Tuban. Dalam penelitian ini terdapat 4 bidang yang ada di Bappeda dan BPPKAD terdapat 5 bidang. Aplikasi software SPSS 22 digunakan untuk metode analisis data penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria kepala bidang, wakil bidang, sekretaris, bidang keuangan, dan bidang pelaporan.

HASIL

Peneliti membagikan kuesioner kepada responden sebanyak 80 eksemplar. Jumlah responden, jenis kelamin, usia, jabatan, tingkat pendidikan, dan masa kerja digunakan untuk menjabarkan profil responden dalam penelitian ini. Tabel 2 menunjukkan mayoritas responden 51 orang (63.8%) adalah perempuan sedangkan sisanya 29 orang (36.3%) adalah laki-laki. Hasilnya, distribusi data responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin perempuan paling banyak. Tabel 3 menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia 20-25 Tahun sebanyak 8 orang (10%). Terdapat 41 responden (51.3%) berusia 26-30 Tahun, sebanyak 12 responden (15%) berusia 31-35 Tahun, sedangkan 11 responden (13.8%) berusia 36-40 Tahun, dan sisanya 8 responden (10%) berusia >40 Tahun. Oleh karena itu, sebaran data responden berdasarkan usia menunjukkan bahwa responden lebih banyak berusia 26-30 Tahun.

Tabel 1
Deskripsi Responden

Keterangan	Frekuensi	Presentase
Kuesioner yang disebar	80	100%
Kuesioner yang kembali	80	100%
Kuesioner yang tida kembali	0	0%
Kuesioner yang memenuhi syarat	80	100%
Kuesioner yang tidak memenuhi syarat	0	0%

Sumber : Data olahan

Tabel 2
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	presentase
Laki – laki	29	36.3%
Perempuan	51	63.8%
Total	80	100%

Sumber : Data olahan

Tabel 3
Distribusi Responden Berdasarkan usia

Usia	Jumlah	Presentase
20-25	8	10%
26-30	41	51.3%
31-35	12	15%
36-40	11	13.8%
>40	8	10%
Total	80	100%

Sumber : Data olahan

Tabel 4
Distribusi Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah	Presentase
Kepala Bidang	2	2.5%
Wakil Bidang	2	2.5%
Sekretariat	8	10%
Bagian Keuangan	30	30%
Bagian Pelaporan	38	47.5%
Total	80	100%

Sumber : Data olahan

Tabel 4 menunjukkan responden yang paling banyak mengisi kuesioner menjabat dalam bagian keuangan sebanyak 38 orang (47.5%). Responden yang menjabat dalam bagian pelaporan sebanyak 30 orang (30%). Sedangkan responden lainnya menjabat sebagai sekretariat sebanyak 8 orang (10%). Responden yang menjabat sebagai kepala bidang sebanyak 2 orang (2.5%) dan yang menjabat sebagai wakil kepala bidang sebanyak 2 orang (2.5%). Oleh karena itu, distribusi data responden berdasarkan jabatan menunjukkan bahwa responden lebih banyak yang menjabat dalam bagian keuangan.

Tabel 5
Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
Diploma	10	12.5%
S1	67	83.8%
S2	2	2.5%
S3	1	1.3%
Total	80	100%

Sumber : Data olahan

Tabel 5 menyajikan sebagian besar responden dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 67 orang (83.8%). Responden dengan tingkat pendidikan D3 sebanyak 10 orang (12.5 %), dan S2 sebanyak 2 orang (2.5%), dan sisanya memiliki tingkat pendidikan S3 sebanyak 1 orang (1.3%) dari seluruh responden yang mengisi kuesioner. Distribusi responden menurut tingkat pendidikan menunjukkan bahwa lebih banyak responden dengan gelar S1 (Strata 1).

Tabel 6
Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Jumlah	Presentase
1-3 tahun	22	27.5%
4-5 tahun	32	40%
>5 tahun	26	32.5%
Total	80	100%

Sumber : Data olahan

Tabel 6 menggambarkan responden yang paling banyak memiliki masa kerja 1-3 Tahun yaitu sebanyak 22 orang (27.5%). Responden dengan masa kerja 4-5 Tahun sebanyak 32 orang (40%). Sedangkan responden dengan masa kerja >5 Tahun sebanyak 26 orang (32.5%). Dengan demikian,

distribusi data responden berdasarkan masa kerja menunjukkan lebih banyak responden dengan masa kerjanya 4-5 tahun. Tabel 7 menunjukkan setiap pernyataan dinyatakan valid karena memiliki nilai sig >0.03. Hasil pengujian pada Tabel 8 menunjukkan setiap pernyataan dinyatakan valid dikarenakan memiliki nilai Sig >0.03. Hasil pengujian validitas variabel pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas disajikan pada Tabel 9 Item lima merupakan indikator pernyataan yang tidak valid. Pernyataan yang tidak valid akan dihapus, dikarenakan memiliki nilai sig <0.03. Tabel 10 menampilkan hasil pengujian ulang validitas variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil pengujian ulang pada Tabel 11 menunjukkan seluruh pernyataan dinyatakan karena memiliki nilai Sig. >0,03.

Tabel 7
Hasil Uji Validitas Variabel Penyajian Laporan Keuangan

Variabel	Nilai Sig	Kriteria
X1.1	0.581	Valid
X1.2	0.346	Valid
X1.3	0.566	Valid
X1.4	0.554	Valid
X1.5	0.711	Valid
X1.6	0.611	Valid
X1.7	0.531	Valid
X1.8	0.855	Valid
X1.9	0.782	Valid
X1.10	0.664	Valid
X1.11	0.754	Valid
X1.12	0.724	Valid

Sumber : Data olahan

Tabel 8
Hasil Uji Validitas Variabel Aksesibilitas

Variabel	Nilai Sig	Kriteria
X2.1	0.580	Valid
X2.2	0.567	Valid
X2.3	0.520	Valid
X2.4	0.556	Valid
X2.5	0.531	Valid
X2.6	0.590	Valid

Sumber : Data olahan

Tabel 9
Hasil Uji Validitas Variabel akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Variabel	Nilai Sig	Kriteria
Y1	0.579	Valid
Y2	0.410	Valid
Y3	0.559	Valid
Y4	0.520	Valid
Y5	0.000	Tidak Valid
Y6	0.525	Valid
Y7	0.453	Valid
Y8	0.433	Valid
Y9	0.469	Valid
Y10	0.544	Valid
Y11	0.573	Valid
Y12	0.392	Valid
Y13	0.605	Valid
Y14	0.415	Valid

Sumber : Data olahan

Tabel 10
Hasil Uji Validitas Ulang Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Variabel	Nilai Sig	Kriteria
Y1	0.579	Valid
Y2	0.410	Valid
Y3	0.559	Valid
Y4	0.520	Valid
Y6	0.525	Valid
Y7	0.453	Valid
Y8	0.433	Valid
Y9	0.469	Valid
Y10	0.544	Valid
Y11	0.573	Valid
Y12	0.392	Valid
Y13	0.605	Valid
Y14	0.415	Valid

Sumber : Data olahan

Tabel 12.
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	4.13758109
Most Extreme Differences	Absolute	0.091
	Positive	0.061
	Negative	-0.091
Test Statistic		0.091
Asymp. Sig. (2-tailed)		.159 ^c

Sumber : Data olahan

Hasil uji normalitas statistik pada Tabel 12 menunjukkan probabilitas signifikan adalah $0.159 > 0.05$ maka penyebaran data terdistribusi normal. Tabel 13 menunjukkan bahwa nilai sig pada Deviation from Linierity adalah 0.360. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 atau $0.360 > 0.05$ maka terdapat hubungan yang linier antara variabel penyajian laporan keuangan dan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan tabel 14 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada Deviation from Linierity adalah 0.408. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 atau $0.408 > 0.05$ maka terdapat hubungan yang linier antara variabel aksesibilitas dan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 13
Hasil Uji Linieritas Variabel X1 dan Y

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah * Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan	Between Groups	(Combined)	597.427	15	39.828	2.342	0.010
		Linearity	331.294	1	331.294	19.481	0.000
		Deviation from Linearity	266.132	14	19.009	1.118	0.360
	Within Groups		1088.373	64	17.006		
	Total		1685.800	79			

Sumber : Data olahan

Tabel 14
Hasil Uji Linieritas X2 dan Y

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah * Aksesibilitas	Between Groups	(Combined)	125.040	6	20.840	0.975	0.449
		Linearity	15.128	1	15.128	0.708	0.403
		Deviation from Linearity	109.911	5	21.982	1.028	0.408
	Within Groups		1560.760	73	21.380		
	Total		1685.800	79			

Sumber : Data olahan

Tabel 15
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.445 ^a	0.198	0.177	4.191

Sumber : Data olahan

Tabel 15 bahwa variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas sebesar 0.177 atau 17.7%. Sedangkan sisanya sebesar 0,823 atau 82.3%, merupakan faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini. Media massa maupun website tidak banyak memberikan informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah di masing-masing daerah merupakan faktor tambahan yang dapat berdampak. Tabel 16, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas bersama-sama mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah karena nilai nilai F hitung sebesar 9.490 dengan nilai F tabel probabilitas pada kolom signifikan sebesar 0.000 menunjukkan F hitung > F tabel. Jika nilai signifikansinya $0.000 < 0.005$ maka dapat dinyatakan model sudah signifikan.

Tabel 16
Hasil Uji Statistik F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	333.353	2	166.677	9.490	.000 ^b
	Residual	1352.447	77	17.564		
	Total	1685.800	79			

Sumber : Data olahan

Tabel 17
Hasil Uji Signifikasi t

Model		Unstandardized	Coefficients	Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	37.406	7.368		5.077	0.000
	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan	0.377	0.089	0.439	4.256	0.000
	Aksesibilitas	0.078	0.226	0.035	0.342	0.733

Sumber : Data olahan

Nilai signifikansi variabel penyajian laporan keuangan sebesar $0.000 < 0.005$, menunjukkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara parsial dipengaruhi oleh penyajian laporan keuangan atau H1 diterima. Sebaliknya variabel aksesibilitas laporan keuangan memiliki nilai $0.733 > 0.005$, menunjukkan bahwa H2 ditolak karena aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sehingga dari tabel tersebut dapat diuraikan persamaan regresi : $Y = 37.406 + 0.377X + 0.078Z$

Pada persamaan regresi di atas dapat diartikan nilai konstanta sebesar 37.406 yang menunjukkan variabel independen dianggap konstan, maka akuntabilitas akan meningkat sebesar 37.406. Koefisien regresi untuk variabel penyajian laporan keuangan sebesar 0.377, hal ini menunjukkan setiap 1 satuan perubahan variabel meningkat sebesar 0.377. Koefisien regresi untuk variabel aksesibilitas sebesar 0.078 hal ini menunjukkan bahwa setiap adanya 1 satuan perubahan variabel akuntabilitas maka akan perubahan variabel akuntabilitas meningkat sebesar 0.078.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan memiliki tingkat nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$. menunjukkan H1 diterima atau akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi secara signifikan dipengaruhi oleh penyajian laporan keuangan daerah. Secara teori, akuntabilitas kepada publik diperlukan. kepada publik. Dengan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa pemerintah telah menyajikan laporan keuangan untuk memenuhi tanggungjawabnya kepada publik.

Hasil pengujian hipotesis (Uji-t) menunjukkan bahwa tingkat sig aksesibilitas laporan keuangan sebesar $0.733 > 0.05$. H2 ditolak atau hasil pengujian menunjukkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tidak dipengaruhi oleh aksesibilitas. Variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah menghasilkan nilai F sebesar 9.490 dengan tingkat signifikan sebesar $0.000 < 0.05$. H3 diterima, yang berarti akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi signifikan oleh penyajian laporan keuangan, dan aksesibilitas laporan keuangan dengan tingkat signifikansi sebesar 17.7%.

SIMPULAN

Beberapa kesimpulan dapat ditarik dari hasil pengujian dan pembahasan :

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi positif oleh Penyajian laporan keuangan daerah. Kepatuhan penuh terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, dan penyajian laporan keuangan daerah secara lengkap memungkinkan kontrol dan pengawasan pengelolaan keuangan yang tepat.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas laporan keuangan daerah. Hal ini bisa terjadi karena akses laporan keuangan pemerintah daerah masih terkendala. Selain itu, baik media massa maupun website tidak banyak memberikan informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah di masing-masing daerah.
3. Bukti empiris juga menggambarkan penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan salah satu bentuk konkrit guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2014, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Empat, Salemba Empat, Jakarta:2041
- Arikunto, S. (2016). *Proedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiyanto, M. E. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Darbianda, R. 2018. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksebilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Pemerintah Daerah Kota Palembang, *Doctoral dissertation*, Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Erlina, dkk. 2018. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Ghozali, I. 2016, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim Abdul & M. Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah* Edisi Empat. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Kurniawan Dita & Sri Rahayu. 2018. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksbilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Sekretariat Daerah Kota Mataram tahun 2018), 6(1), 705.
- Lewier, C.N. dan Kurniawan, C.H. 2016. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Novatiani, A., Kusumah, R. W. R., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 10(1), 51-62.
- Peggy Sande. 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 1(1)
- Purnama, F., & Nadirsyah, N. 2016. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 1-15.
- Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. PP No. 58 Tahun 2005.
- Peraturan Menteri dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah. Permendagri No. 13 Tahun 2006.
- Peraturan Pemerintah tentang standar Akuntansi pemerintahan. PP No. 71 Tahun 2010.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri No. 77 Tahun 2020.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rahimah, L. N., Murni, Y., & Lysandra, S. 2018. Pengaruh Penyajian Lapopran Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud yang Terjadi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah,

- Desa Sukaesmi dan Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi). *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen)*, 6(12), 139-154.
- Septa, P. 2018. Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan kabupaten ponorogo, *Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta
- Sukmawati Fitri & Alfi Nurfitriani. 2019. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis*. 2(1).
- Supriyono, R.A, 2018. *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wiguna, S. 2015. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)* Universitas Pendidikan Ganesha, 3.